

**PENYUSUNAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(L K P J)
KECAMATAN PATEBON
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : KECAMATAN
NAMA KECAMATAN : PATEBON

I. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Capaian Indikator Kinerja OPD

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tugas camat adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Kecamatan sebagai unsur kewilayahan melaksanakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan. Untk itu camat melaksanakan kewenangan, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, sepatutnya meningkatkan semangat dari camat dan aparatur kecamatan untuk melaksanakan tugasnya secara optimal dalam penyelenggaraan otonomi mengingat posisi strategisnya itu maka camat perlu lebih aktif dalam upaya mengoptimalisasi pelaksanaan tugasnya.

Pelayanan Kecamatan berupa penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya dilakukan di kecamatan diselenggarakan demi mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, secara kondisi geografis daerah akan lebih efektif dan efisien dilayani melalui kecamatan. Dengan demikian, pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan menjadi lebih berkualitas, mudah, cepat dan transparan serta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan ini terutama terlihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan. Melalui penyelenggaraan pelayanan di kecamatan, lokasi kecamatan jelas lebih dekat

dan relatif mudah dijangkau masyarakat bila dibandingkan dengan ibukota Kabupaten dan waktu yang diperlukan juga menjadi lebih sedikit.

Tabel 1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kendal (IKU Pemda)
Tahun 2025 (*Sesuai Tabel RPJMD*)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Tahun 2025	
			2024	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tujuan : mengetahui gambaran Kepuasan Masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Kendal Sasaran : Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,67	94	90,36
		Nilai Sakip Kecamatan	70,05	75	71,35

Sumber Data : kecamatan Patebon Tahun 2025

Berdasarkan data tabel capaian IKU di atas dapat dijelaskan hal-hal berikut ini, bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan di kecamatan dihitung berdasarkan Peraturan menteri PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik sehingga diperoleh angka sesuai dengan yang tertera pada tabel di atas.

Terhadap capaian realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 90,36% dibandingkan dengan capaian 2024 sebesar 94,07% maka dapat dijelaskan bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh kecamatan masih perlu ditingkatkan dan baik kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan dan tujuan pelayanan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor pendorong/penghambat untuk pencapaian target kinerja yaitu:

1. Komitmen dan Kepemimpinan

- Pimpinan berperan penting dalam memberikan arah, motivasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan. Kepemimpinan yang baik mendorong aparatur bekerja secara disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

- Aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi mampu melaksanakan program dan kegiatan secara efektif. Pembinaan dan peningkatan kapasitas pegawai turut mendukung peningkatan kinerja Kecamatan.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi, pengelolaan data, dan pelayanan publik membantu meningkatkan efisiensi kerja, ketepatan waktu, serta transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

4. Perencanaan program dan kegiatan yang terarah

- Perencanaan yang disusun secara sistematis dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga capaian kinerja dapat terukur dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

5. Koordinasi dan kerja sama antarunit kerja

- Koordinasi yang baik antar seksi di Kecamatan, serta kerja sama dengan kelurahan/desa dan instansi terkait, mendukung kelancaran

pelaksanaan kegiatan dan meminimalkan hambatan dalam pencapaian target kinerja.

6. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin memungkinkan identifikasi kendala sejak dini serta menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan ke depan.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:

1. Keterbatasan sumber daya manusia

- Jumlah aparatur yang terbatas serta perbedaan kompetensi dan beban kerja antarpegawai dapat menghambat optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga capaian kinerja belum sepenuhnya maksimal.

2. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana

- Ketersediaan anggaran yang terbatas serta sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi

- Kurangnya koordinasi dan Kerjasama antar pimpinan dan bawahan yang menyebabkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab.

4. Perubahan kebijakan dan regulasi

- Adanya perubahan kebijakan atau regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah memerlukan penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, yang dapat berdampak pada keterlambatan atau perubahan target kinerja.

5. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal

- Masih adanya keterbatasan pemahaman aparatur terhadap teknologi informasi atau kendala jaringan menyebabkan pengelolaan data dan administrasi belum berjalan secara efisien.

6. Tingginya beban tugas administratif

- Banyaknya tugas administratif yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan dapat mengurangi fokus aparatur terhadap pelaksanaan kegiatan yang berorientasi langsung pada pencapaian target kinerja.

dengan beberapa inovasi/terobosan yang telah dilakukan kecamatan Patebon dalam pencapaian target kinerja tahun 2025 berupa realisasi APBD sebesar 90,36%. Inovasi/terobosan ini sangat diperlukan dalam pencapaian target kinerja karena dengan inovasi dapat membantu melakukan pekerjaan dengan lebih efisien, mengurangi biaya dan juga meningkatkan produktifitas.

Dengan *tercapainya* target tahun 2025 sebesar 90,36% maka beberapa strategi yang telah dan akan dilakukan untuk pencapaian kinerja yaitu:

Dengan beberapa inovasi/terobosan yang telah dilakukan Kecamatan Patebon dalam pencapaian target kinerja tahun 2025 berupa Realisasi APBD 87,57%.

Dengan *tercapainya* target tahun 2025 sebesar 87,57% maka beberapa strategi yang telah dan akan dilakukan untuk pencapaian kinerja yaitu:

1. Penguatan Sistem Perencanaan
 - Menyusun perencanaan yang realistis, terukur, dan berbasis data
2. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia
 - Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai secara berkelanjutan serta Program Pengembangan Karir adalah memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti kursus, seminar, ataupun pendidikan lanjutan guna mendalami bidang kerja mereka.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja seperti AI, big data, dan otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan.
4. Peningkatan Partisipasi Stakeholder
 - Melibatkan seluruh stakeholder dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
5. Evaluasi Berkala
 - Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi.

6. Peningkatan Akuntabilitas

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui mekanisme pengawasandan pengendalian yang efektif.

7. Pemberian Tujuan yang Jelas dan Terukur (SMART)

- Sasaran Spesifik: Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, yang memotivasi individu untuk bekerja keras mencapainya.

8. Penerapan Teknologi dan Inovasi

- Digitalisasi Proses Kerja: Mengadopsi teknologi terbaru untuk menyederhanakan tugas dan meningkatkan efisiensi.
- Automatisasi: Menggunakan alat otomatis untuk proses yang berulang dan menghemat waktu, memungkinkan karyawan untuk fokus pada tugas yang lebih strategis.

9. Peningkatan Kepemimpinan dan Manajerial

- Pelatihan Kepemimpinan: Mengembangkan keterampilan kepemimpinan melalui pelatihan agar pemimpin bisa lebih efektif dalam mengarahkan tim.
- Pendekatan Kepemimpinan Kolaboratif: Memberikan ruang bagi anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan masukan.

10. Meningkatkan Komunikasi Internal

- Rapat Tim Rutin: Mengadakan pertemuan secara teratur untuk memfasilitasi komunikasi antara atasan dan bawahan serta antar anggota tim.
- Feedback Terbuka: Mendorong budaya memberikan dan menerima umpan balik konstruktif untuk meningkatkan kinerja.

11. Penilaian dan Penghargaan Kinerja

- Sistem Penilaian Kinerja: Menerapkan sistem evaluasi kinerja yang objektif dan transparan, serta memberikan umpan balik yang membangun.
- Penghargaan dan Insentif: Memberikan insentif finansial maupun nonfinansial (seperti penghargaan karyawan terbaik, liburan, dll.) untuk meningkatkan motivasi.

Strategi yang Akan Dilakukan untuk Pencapaian Kinerja:

1. Transformasi Budaya Kerja
 - Kebudayaan Organisasi yang Mendukung Inovasi: Membangun budaya yang mendukung kreativitas, kolaborasi, dan berbagi pengetahuan antar karyawan.
 - Penghargaan atas Kreativitas: Menciptakan penghargaan atau insentif bagi individu yang memberikan ide baru atau solusi inovatif.
2. Penggunaan Teknologi Canggih untuk Analisis Kinerja
 - Big Data dan AI: Menggunakan analitik berbasis data dan kecerdasan buatan (AI) untuk melacak dan menganalisis kinerja secara real-time.
 - Dashboard Kinerja Digital: Mengembangkan platform untuk memantau pencapaian kinerja secara lebih transparan dan akurat.
3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
 - Program Kesehatan Mental: Menyediakan dukungan bagi karyawan dalam hal kesehatan mental dan keseimbangan kehidupan kerja.
 - Fleksibilitas Kerja: Memberikan kebijakan kerja fleksibel (seperti bekerja dari rumah atau jam kerja fleksibel) untuk mendukung kesejahteraan dan produktivitas karyawan.
4. Peningkatan Kolaborasi dan Kerja Tim
 - Cross-Functional Teams: Membentuk tim lintas fungsi untuk menyelesaikan proyek dengan berbagai perspektif dan keahlian.
 - Kolaborasi Virtual: Meningkatkan penggunaan platform kolaborasi daring untuk memastikan komunikasi dan koordinasi tetap berjalan lancar, meski dalam situasi kerja jarak jauh.
5. Penyusunan Rencana Pengembangan Organisasi
 - Strategi Jangka Panjang: Merancang dan menyusun strategi organisasi yang berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi.
 - Inovasi Berkelanjutan: Menumbuhkan mindset inovasi di semua level organisasi untuk memastikan daya saing dan peningkatan kinerja.
6. Analisis SWOT
 - Melakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi.

2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025

Kecamatan Patebon melaksanakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan dengan jumlah pagu tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 3.035.516.074 dan terealisasi sebesar Rp. 2.658.199.837 atau 87,57% dan realisasi fisik sebesar 87,57% yang terdiri 5 Program dan 11 Kegiatan

Capaian kinerja program dan kegiatan secara rinci dituangkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pada Kecamatan Patebon Tahun Anggaran 2025

Uraian Program / Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja/Anggaran	Realisasi Kinerja/Anggaran	% Kinerja	Status Capaian
1		2	3	4	5	6
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	2.763.010.474	2.419.585.435	87,16%	Tercapai
			100	100	100%	Tercapai
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	10	100%	Tercapai
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima	16	16	100%	Tercapai

		Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)				
3	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor (Persen)	100	100	100%	Tercapai
4	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	100	100%	Tercapai
5	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (Persen)	100	100	100%	Tercapai
Program Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan Publik		Persentase pelimpahan	131.150.800	120.958.152	92,23%	Tercapai
		pelaksanaan pelimpahan	100	89,74	89,74%	Tercapai

		n kewenang an kecamatan				
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	100%	Tercapai
2	Koordinasi Pemeliharaan Prasara dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Intalasi Vertikal yang Terkait dalam Pemelihara an Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	12	12	100%	Tercapai

3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	100%	Tercapai
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan		Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Kecamatan	52.951.600	43.356.250	81,88%	Tercapai
			100	100	100%	Tercapai
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberday aan masyarakat desa (Desa)	18	18	100	Tercapai
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Aspirasi Masyarakat dalam Musrenvan g RKPD	19.850.800	16.000.000	80,60%	Tercapai
			100	100	100%	Tercapai
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan	Jumlah orang yang Mengikuti	18	18	100%	Tercapai

	umum sesuai penugasan kepala daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Biumtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional (Orang)				
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	68.552.400	54.600.000	79,65%	Tercapai
			100	100	100%	Tercapai
1	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1	1	100%	Tercapai

Dari tabel diatas dapat diuraikan beberapa hal terkait pencapaian program dan kegiatan tahun 2025.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 5 Kegiatan. Pencapaian Target kinerja pada program ini sebesar 87,16%. Secara keseluruhan pada program penunjang telah sesuai penggunaan karena bersifat rutin yang menunjang atau mencukupi dari

semua kegiatan, namun pada kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi 71,01 % dari anggaran Rp 118.914.701,- kemudian terealisasi sebesar Rp 84.437.392,- .Tidak tercapainya adalah pada sub kegiatan perjalanan Dinas luar yang dikarenakan efisiensi.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dapat terealisasi 92,23 % dari jumlah anggaran Rp 131.150.800,- dapat terealisasi Rp 120.958.152. dari jumlah tersebut untuk kegiatan sudah terlaksana semua dan sisa anggaran adalah pada kegiatan honor nara sumber pada kegiatan sosialisasi dan anggaran foto copy.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terdiri dari 1 Kegiatan. Target kinerja yang tercapai adalah 1 kegiatan target tercapai semua. Ketercapaian dalam program ini sebesar 81,88 % dari total anggaran sebesar Rp 52.951.600,- yang terealisasi sebesar Rp 43.356.250,- tidak ketercapaian hanya pada sub kegiatan honor narasumber sosialisasi.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terdiri dapat terealisasi sebesar 80,60 % dari total anggaran 19.850.800 kemudian dapat terealisasi sebesar Rp 16.000.000 yang terdiri dari 1 Kegiatan yang telah dilaksanakan faktor ketidaktercapaian juga hanya pada honor narasumber.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 1 Kegiatan. Target kinerja yang tercapai 1 kegiatan tercapai semua. Meskipun dilihat pada jumlah anggaran hanya terserap 79,65 %. Untuk faktor tidak serapnya anggaran juga masih sama pada kegiatan yang lain yaitu sisa dari anggaran foto copy dan narasumber.

3. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PPROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA

No	Nama Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7(=4/6x100)	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1	100	5	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan Publik	1	89,74	3	100	89,74	Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
4	Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi

No	Nama Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7(=4/6x100)	8
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
	Total	5	97,94	11	100	97,94	Sangat Tinggi

****Kriteria predikat**

1	Sangat tinggi	$\geq 91\%$
2	Tinggi	76 – 90,99%
3	Sedang	66 – 75,99%
4	Rendah	51 – 65,99%
5	Sangat Rendah	$\leq 50,99$

Kinerja Program pada Kecamatan Patebon dengan jumlah 5 indikator kinerja dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 97,94 persen. Kinerja program ini didukung oleh kegiatan sebanyak 11 dengan indikator sebanyak 5 indikator, dengan rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100 persen. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 97,94 persen, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian

sangat tinggi.

Tingkat kesesuaian antara kinerja program dengan kegiatan dinilai sangat tinggi, yang artinya kegiatan yang dilakukan sudah tepat dalam mendukung kinerja program. Namun di tahun depan perlu strategi lain untuk mendorong ketercapaian kinerja program, mengingat kinerja program pada tahun depan adalah untuk mendukung ketercapaian indikator sasaran dan program RPJMD serta indikator kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renstra ada tambahan indikator-indikator baru, serta dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan urusan kewenangan yang menjadi kewenangan OPD Kecamatan Patebon sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku baik peraturan kementerian/ Lembaga teknis maupun kementerian dalam negeri, agar lebih optimal dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

4. Permasalahan dan solusi

a. Permasalahan

Dari uraian di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam mewujudkan target kinerja tahun 2025 yaitu :

1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan.
2. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan dan keuangan baik secara kuantitas maupun kualitas
3. Masih belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasi sasaran program dan menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektifitas program/kegiatan
5. Belum optimalnya pegawai yang menduduki jabatan, Sub Bagian maupun Seksi dalam pelaksanaan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

b. Solusi

Dari beberapa permasalahan tersebut di atas beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya/meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan serta solusi yang disarankan untuk pelaksanaan tahun yang akan datang :

1. Dengan menguatkan komitmen dan kerjasama dalam manajemen internal organisasi dilingkungan Kecamatan Patebon dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan
2. Penambahan dan pembenahan sarana dan prasarana kerja berupa ruang kerja yang memadai, peralatan kantor yang mencukupi serta perlengkapan lainnya dalam menunjang kegiatan.
3. Penempatan pegawai yang sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki dengan menyesuaikan tugas dan bidang masing-masing
4. Diadakan koordinasi secara rutin, pengawasan, evaluasi dan juga pelaporan dalam pelaksanaan tugas.
5. Adanya penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan.